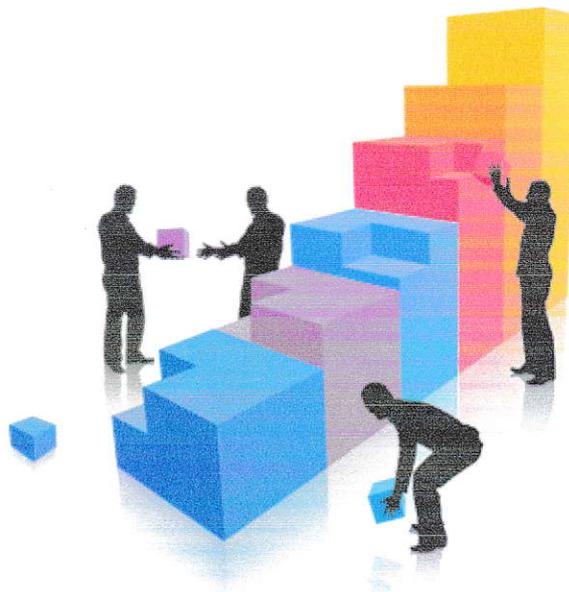




Revisi
RENSTRA
(Rencana Strategis)
Tahun 2016-2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019



Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. 0756 21218
Fax. 0756 21218

Email : dinaskesehatan@pesisirselatankab.go.id
Website : dinkes.pesisirselatankab.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera***".

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan UPTD-nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun selama tahun 2016-2021.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	
2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ..	5
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	17
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.....	25
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	25
3.3 Telahaan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.....	26
3.4 Telahaan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kesehatan.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Dinas Kesehatan	31
4.2 Sasaran Dinas Kesehatan.....	31

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kesehatan.....	47
5.2	Analisa Pencapaian Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.....	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	52
A.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	52
B.	Pendanaan Indikatif	55
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG DAN URUSAN	56
BAB VIII	PENUTUP	58
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD Kesehatan) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan serta memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 juga merupakan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016 -2021.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan lebih fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dan terwujud dengan sebaik-baiknya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan UPTD-nya.
- c. Sebagai upaya sinergisme, sinkronisasi, dan integrasi serta koordinasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan beserta UPTD nya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait dalam berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Reencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**
- 2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Lembaga Serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
 - 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan Dinas Kesehatan
 - 4.2 Sasaran Dinas Kesehatan
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kesehatan
 - 5.2 Analisa Pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

6.2 Pendanaan Indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka kedudukan Dinas Kesehatan Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan laporan pengendalian Pemerintahan Daerah;

- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang kesehatan, masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
 - f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas kesehatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di dinas kesehatan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - b. Pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan pelaporan dan sub bagian keuangan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
 - d. Pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- c. Memfasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

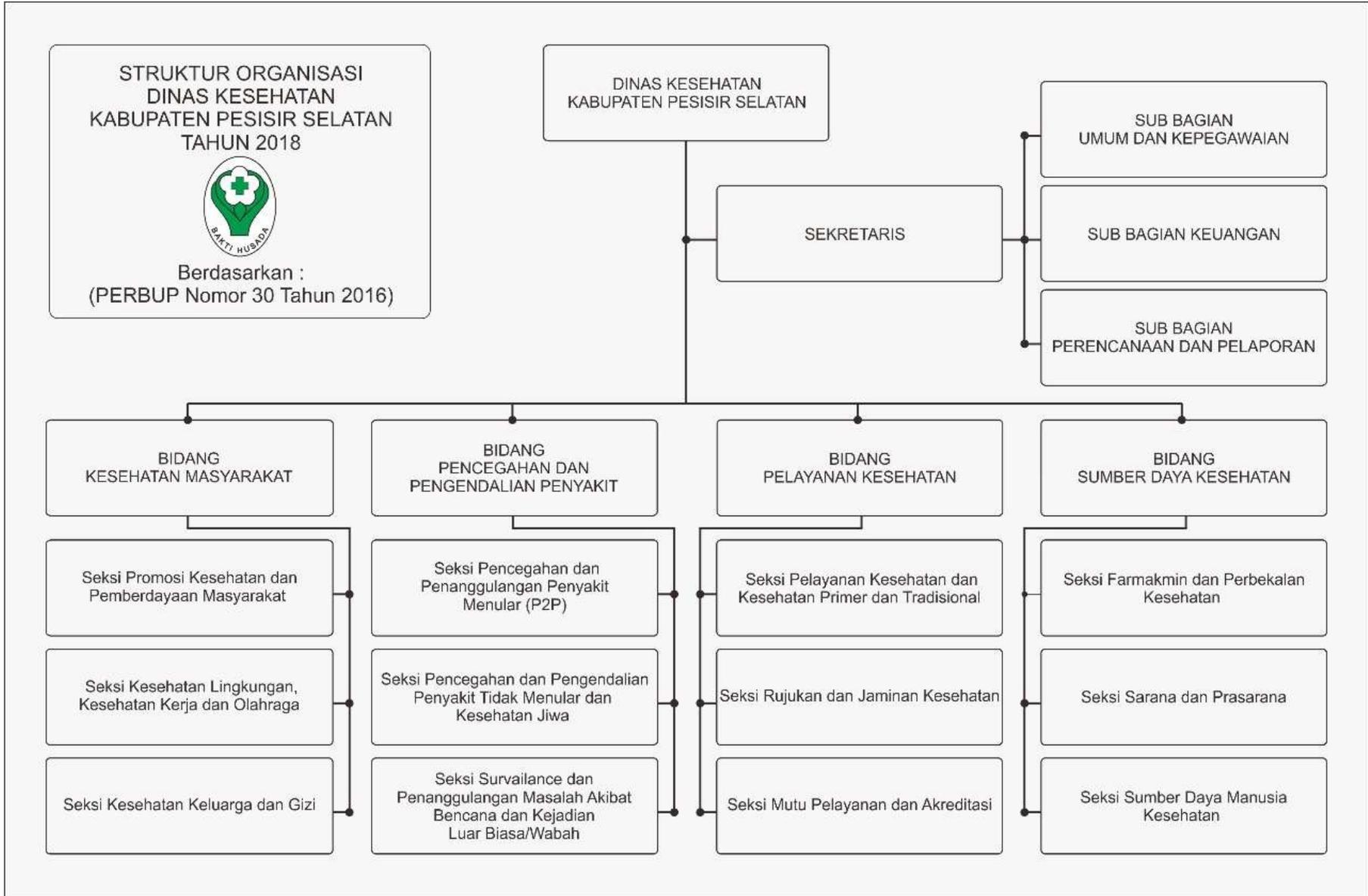
- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana , serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana, serta pengembangan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana, serta pengembangan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana, serta pengembangan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan ketentuan
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan 18 (delapan belas) UPTD Puskesmas pada tahun 2015 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Kondisi Ketenagaan (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan,
dan Puskesmas Berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	33
2.	Fungsional Terampil	584
4.	Staf Penunjang Administrasi	18
5.	Staf Penunjang Teknologi	0
6.	Staf Penunjang Perencanaan	0
7.	Tenaga Pendidik	10
8.	Tenaga Kependidikan	4
9.	Juru	4
10.	Tenaga Penunjang Kesehatan	26
	JUMLAH	679

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2015

Tabel. 2.2
Kondisi Ketenagaan (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan,
dan Puskesmas Berdasarkan Pendidikan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Doktor (S3)	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	16
4.	Sarjana (S1)	125
5.	Sarjana Muda (D1 dan D3)	272
6.	SLTA	256
7.	SLTP	8
8.	SD	2
	JUMLAH	679

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2015

Tabel. 2.3
Kondisi Ketenagaan (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan,
dan Puskesmas Berdasarkan Jenis Profesi
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Dokter Spesialis	16
2.	Dokter Umum	24
4.	Dokter Gigi	18
5.	Perawat dan Perawat Gigi	253
6.	Bidan	210
7.	Tenaga Kefarmasian	26
8.	Kesehatan Masyarakat	11
9.	Kesehatan Lingkungan	16
10.	Tenaga Gizi	20
11.	Tenaga Keterampilan Fisik	6
12.	Tenaga Ketekhnisian Medis	45
13.	Tenaga Kesehatan lainnya	33
JUMLAH		679

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2015

Berdasarkan tabel-tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sumber daya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan 18 (delapan belas) UPTD Puskesmas pada tahun 2015 berjumlah 862 orang.
- b. Sebanyak 767 orang merupakan tenaga fungsional terampil yang terdiri dari dokter (umum dan gigi), tenaga keperawatan (perawat, perawat gigi dan bidan), tenaga kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, keterampilan fisik, ketekhnisian medis).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Kesehatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa:

- a. 1 unit Rumah sakit yaitu RSUD dr. M. Zein Painan.

- b. 18 Puskesmas di 15 Kecamatan diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari 10 unit Puskesmas Rawatan dan 8 unit Puskesmas Non Rawatan.
- c. 284 Poskesri dan 87 unit Pustu.
- d. 36 unit Posbindu.
- e. 24 unit mobil Ambulance/Puskel.
- f. 8 unit mobil operasional Dinas Kesehatan.
- g. 1 unit Mobil operasional bencana/KLB dan wabah (Hibah dari Kementerian Kesehatan RI).
- h. 1 unit Posko Penanggulangan Bencana/Wabah dan KLB Penyakit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan.

Pada Renstra Tahun 2011-2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama dari 3 (tiga) sasaran prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015. Adapun pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)				68.8	69.1	68.9	69.7	69.8	68.4	68.9	68.9	68.9	68.9	99.42	99.71	100.00	98.85	98.71
2	Angka Kematian Ibu (AKI)				145/100 .000	139/100 .000	132/100 .000	125/100 .000	102/10 0.000	108/100 .000	106/100 .000	71/100 000	69/100 .000	55/100 .000	74.48	76.26	53.79	55.20	53.92
3	Angka Kematian Bayi (AKB)				36/1000	32/1000	30/1000	27/1000	9/1000	12/1000	11/1000	9/1000	4,6/10 00	4,6/10 00	33.30	34.38	30.00	17.04	51.11
4	Pelayanan Kesehatan Lansia				70	75	80	85	90	58.5	28.9	55.3	74.54	87.6	83.57	38.53	69.13	87.69	97.33
5	K4 Ibu Hamil				85	90	93	95	95	75.8	78.5	94	87.82	88.8	89.18	87.22	101.08	92.44	93.47
6	Penanganan Komplikasi Kebidanan				65	68	71.5	75	75	71.1	58.3	70.2	74.39	85.5	109.38	85.74	98.18	99.19	114.00
7	Persalinan Linakes				75	76	89	90	90	86.6	87.9	90.2	94.1	88.8	115.47	115.66	101.35	104.56	98.67
8	Puskesmas PONED				25	50	75	85	100	50	75	75	100	100	200.00	150.00	100.00	117.65	100.00
9	Kunjungan Neonatus				75	80	86	89	89	94.3	94.8	94	98.81	92.4	125.73	118.50	109.30	111.02	103.82
10	Kunjungan Bayi				77	82	87	90	90	55.7	67.4	92.4	85.3	86.5	72.34	82.20	106.21	94.78	96.11
11	Penanganan Komplikasi Neonatus				65	70	75	80	90	35.4	21.6	88.2	44.44	53.5	54.46	30.86	117.60	55.55	59.44
12	Persentase Balita Kekurangan Gizi				< 15	<15	< 15	< 15	< 15	11.7	10.4	8.3	8.9	6.6	78.00	69.33	55.33	59.33	44.00
13	Balita Gizi Buruk dapat Perawatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

14	Bumil dapat fe3				75	78	81	95	95	72.5	79.9	73.3	91.08	89.1	96.67	102.44	90.49	95.87	93.79
15	ASI Eksklusif				75	75	75	80	85	46.6	45.3	60.2	76.08	82.3	62.13	60.40	80.27	95.10	96.82
16	Balita dapat kapsul vitamin A				75	80	83	85	90	98.1	83.3	91.6	93.41	92.2	130.80	104.13	110.36	109.89	102.44
17	CDR TB Paru				70	70	70	70	70	74.7	74.7	83.1	82.68	80	106.71	106.71	118.71	118.11	114.29
18	Succes Rate TB Paru				100	100	100	100	95	96	94	94	95.04	96.4	96.00	94.00	94.00	95.04	101.47
19	Succes Rate Malaria				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Succes Rate DBD				70	70	70	70	100	99.8	98.3	99.7	99.66	100	142.57	140.43	142.43	142.37	100.00
21	Desa UCI				75	80	85	88	90	86.6	84.6	85	89.81	87	115.47	105.75	100.00	102.06	96.67
22	Imunisasi dasar Lengkap				75	80	85	90	90	85.4	90	93	92.97	87	113.87	112.50	109.41	103.30	96.67
23	Akses Air Minum Sehat				60	65	66	67	90	72.7	77	78.1	79.67	79.8	121.17	118.46	118.33	118.91	88.67
24	Akses Jamban Sehat				65	70	73	74	75	72.7	68.7	70.8	79.34	79.9	111.85	98.14	96.99	107.22	106.53
25	Rumah Sehat				75	80	83	85	87	65.5	72.6	75.3	79.01	76.6	87.33	90.75	90.72	92.95	88.05
26	TTU Sehat				75	80	83	85	87	67.2	63	77.8	82.96	76.6	89.60	78.75	93.73	97.60	88.05
27	TPM Sehat				65	68	70	79	85	67.2	63	70.6	75.15	70.6	103.38	92.65	100.86	95.13	83.06
28	Ketersediaan Obat PKD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
Belanja Tidak Langsung	28,240,745,742	32,099,397,391	34,911,415,253	36,435,540,193	39,237,229,883	27,628,694,710	30,163,954,570	32,628,347,653	34,919,759,547	38,509,347,066	97.83	93.97	93.46	95.84	98.14	34,184,865,692	32,770,020,709
Belanja Langsung	12,629,554,727	17,028,336,613	23,383,749,075	38,461,308,049	44,392,471,848	9,955,707,102	16,083,985,061	21,075,322,635	27,858,991,034	30,731,678,709	78.83	94.45	90.13	72.43	69.23	27,179,084,062	21,141,136,908
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,298,723,000	2,521,565,450	2,125,638,150	1,874,166,800		1,281,999,167	2,401,917,412	1,937,352,644	1,602,837,164		98.71	95.26	91.14	85.52	1,564,018,680	1,444,821,277
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		367,937,500	1,505,725,000	80,000,000	38,000,000		367,747,500	1,503,980,500	78,366,900	37,942,000		99.95	99.88	97.96	99.85	398,332,500	397,607,380
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15,000,000	15,000,000	15,000,000	50,000,000		15,000,000	15,000,000	11,000,000	49,261,900		100	100	73.33	98.52	19,000,000	18,052,380
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		2,744,844,500	3,186,761,500	3,570,638,000	2,122,903,000		2,743,801,500	2,957,155,412	2,373,549,064	1,671,677,058		99.96	92.80	66.47	78.74	2,325,029,400	1,949,236,607
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat		225,370,972	216,842,500	1,038,299,000	897,268,000		198,771,436	215,383,500	1,022,215,720	831,489,192		88.20	99.33	98.45	92.67	475,556,094	453,571,970
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan		15,641,000	59,974,200	50,280,200	49,224,100		15,601,000	56,874,500	49,030,200	44,953,500		99.74	94.83	97.51	91.32	35,023,900	33,291,840
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		1,187,194,700	1,511,676,130	1,989,173,950	1,876,121,000		1,184,885,200	1,498,177,520	1,890,030,177	1,744,962,778		99.81	99.11	95.02	93.01	1,312,833,156	1,263,611,135
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat		80,960,100	121,840,100	183,678,650	329,139,500		80,960,100	121,231,895	178,845,750	269,849,250		100.00	99.50	97.37	81.99	143,123,670	130,177,399
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat		98,571,875	269,440,090	329,491,500	798,578,900		91,183,875	266,532,854	301,383,240	595,838,020		92.50	98.92	91.47	74.61	299,216,473	250,987,598
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		532,988,402	1,002,873,500	1,408,811,600	1,012,934,000		531,934,050	1,000,675,800	1,196,950,300	562,693,600		99.80	99.78	84.96	55.55	791,521,500	658,450,750
11. Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan		15,933,000	152,038,005	173,103,250	281,176,500		15,913,000	144,786,644	132,966,400	195,689,488		99.87	95.23	76.81	69.60	124,450,151	97,871,106
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		5,953,649,700	4,731,339,700	6,007,821,000	6,613,687,000		5,247,330,102	4,717,598,200	5,724,802,850	6,073,287,492		88.14	99.71	95.29	91.83	4,661,299,480	4,352,603,729
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		4,324,942,100	7,831,562,800	20,918,640,299	27,734,442,448		4,147,490,331	5,931,122,298	12,498,118,419	16,480,082,557		95.90	75.73	59.75	59.42	12,161,917,529	7,811,362,721
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		24,085,000	34,640,000	34,375,600	50,200,000		24,070,000	30,996,000	32,630,500	31,773,800		99.94	89.48	94.92	63.29	28,660,120	23,894,060
15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		64,747,000	175,907,100	326,118,050	537,809,800		61,667,000	167,692,100	281,912,860	427,824,110		95.24	95.33	86.45	79.55	220,916,390	187,819,214
16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		77,747,764	46,563,000	210,238,000	126,820,800		75,630,800	46,248,000	149,809,000	111,516,800		97.28	99.32	71.26	87.93	92,273,913	76,640,920

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat selama periode 2011-2015 terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan dan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2015, walaupun secara kuantitas ada beberapa ketenagaan yang telah mencukupi seperti tenaga kebidanan dan tenaga keperawatan. Beberapa hal yang telah dilakukan evaluasi terhadap masih belum optimalnya kualitas SDM kesehatan, yaitu:

- 1) Dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi minimal sesuai standard maka pada setiap tenaga perlu diatur dalam Permenkes No. 1464/Menkes/SK/X/2010 tentang registrasi dan praktek bidan. Dalam pembangunan kesehatan, SDM merupakan salah satu isu utama yang mendapatkan perhatian terutama terkait dengan jumlah, distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM kesehatan (PP No.38 tahun 2000 dan PP No.41 tahun 2000). Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.
- 2) Tenaga Kesehatan merupakan SDM kesehatan yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tersebut tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi minimal (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) sesuai dengan standar praktek dan kode etik masing-masing. Pada saat ini kompetensi bidan belum lagi standar karena berkembangnya lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta yang menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas beragam serta belum terlaksananya sistem akreditasi pendidikan kesehatan sebagaimana mestinya.

b. Optimalisasi dan perbaikan manajemen Puskesmas

Dengan keluarnya Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014, dimana terjadi perubahan sistem pelaksanaan manajemen Puskesmas kearah yang lebih baik, sehingga sangat diperlukan keseriusan Puskesmas dalam mengelola program dan kegiatannya sendiri dan secara langsung akan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

c. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. Disamping itu, target rekrutmen peserta mandiri bagi peserta JKN juga menjadi prioritas menjelang tahun 2019, sehingga permasalahan ini juga menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang wajib dilayani.

Disamping itu, merubah pola perilaku masyarakat terhadap pentingnya JKN ini masih menjadi kendala, hal ini ditandai dengan seringnya masyarakat kalau sudah dalam keadaan gawat darurat baru melakukan pengurusan kartu JKN. Hal yang tak kalah pentingnya yaitu kemampuan Puskesmas dalam menyediakan bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan dalam menunjang pelayanan kesehatan dari pembiayaan kapitasi JKN Puskesmas, dimana belum ada keberanian Puskesmas dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

d. Belum optimalnya ketersediaan pembiayaan pembangunan kesehatan

Secara trend perkembangan pembiayaan pembangunan kesehatan sejak periode Tahun 2011-2015 memang terjadi peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya, namun apabila dilihat dari besarnya persentase pembiayaan pembangunan kesehatan yang seharusnya 10 % dari anggaran APBD masih belum akan terwujud karena keterbatasan sumber pembiayaan pada APBD Kabupaten. Hal ini juga menjadi tantangan kedepan karena program-program prioritas yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2011-2015 masih banyak yang belum didanai oleh APBD Kabupaten, khususnya untuk pelaksanaan manajemen Puskesmas, akreditasi, kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

e. Pengaruh dan dampak bencana alam

Dampak bencana alam dan perubahan cuaca yang ekstrim pada saat ini juga menjadi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan kesehatan, hal ini dapat dijelaskan bahwa secara kehendak alam memang kita tidak bisa menolak bencana, namun kesiapsiagaan sarana pelayanan kesehatan masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan rehab untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang siap operasional apabila terjadi bencana, kejadian luar biasa (KLB) dan penanganan wabah penyakit, seperti belum tersedianya mobil operasional bencana, masih kurangnya peralatan penunjang penanggulangan pertolongan pertama kesehatan dalam kebencanaan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan beberapa tantangan dan kendala yang dijelaskan diatas, maka ada beberapa peluang yang dapat dijadikan rencana solusi pemecahannya yaitu:

- a. Pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan sebelumnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kesehatan.
- b. Pelaksanaan sistem uji kompetensi yang terakreditasi dalam rangka menciptakan tenaga kesehatan yang lebih berkualitas.
- c. Pengembangan sistem akreditasi dan registrasi Puskesmas dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki pengelolaan dan fungsi manajemen Puskesmas sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi terutama puskesmas keliling dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah yang masih kategori terpencil.
- e. Adanya penerimaan CPNS dari tenaga kesehatan PTT (dokter dan Bidan) dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan tenaga kesehatan, sehingga ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk tetap dapat dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan.
- f. Adanya peluang penerimaan anggaran dari sumber APBN (TP) dan APBD Propinsi untuk menambah kekurangan pembiayaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Dukungan pendanaan dari dana Operasional BOK dan Kapitasi JKN Puskesmas untuk lebih meningkatkan ketersediaan anggaran untuk pelayanan kesehatan

dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standard yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
<p>Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD</p> <p>1. Masih rendahnya Usia harapan hidup masyarakat</p> <p>1. Masih tingginya jumlah kematian bayi</p> <p>2. Masih tingginya jumlah kematian ibu</p> <p>Maternal</p>	<p>MDG's, Renstra</p> <p>2011-2015</p> <p>SPM tahun 2015</p>	<p>1. SDM Kesehatan belum memadai.</p> <p>2. Fasilitas/sarana dan prasarana belum memadai.</p> <p>3. Sistem rujukan belum optimal.</p> <p>4. Policy/regulasi masih kurang.</p> <p>5. Koordinasi lintas program belum terpadu</p>	<p>1. Keterbatasan penerimaan SDM kesehatan.</p> <p>2. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih belum maksimal.</p> <p>3. Dukungsn lintas sectoral masih kurang.</p> <p>4. Dukungan anggaran masih kurang</p>	<p>1. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kurang merata.</p> <p>2. Mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan belum sesuai standard.</p> <p>3. Sistem rujukan maternal neonatal belum optimal</p> <p>4. Peralatan dan sarana serta prasarana penunjang KIA Puskesmas masih kurang.</p>	
<p>3. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan Stunting</p>	<p>MDG's, Renstra</p> <p>2011-2015</p> <p>SPM tahun 2015</p>	<p>1. SDM pelaksana gizi belum mencukupi</p> <p>2. Fasilitas/sarana dan prasarana masih kurang</p> <p>3. Sistem rujukan kasus gizi belum optimal.</p>	<p>1. Gaya hidup masyarakat masih kurang peduli tentang gizi.</p> <p>2. Ketersediaan pangan tingkat rumah tangga belum optimal akibat faktor sosial ekonomi yang masih rendah.</p> <p>3. Masih kurangnya</p>	<p>1. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM yang kurang merata.</p> <p>2. Adanya penyakit infeksi dan penyakit penyerta.</p> <p>3. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan gizi masyarakat</p> <p>4. Kurangnya dukungan anggaran dan pembiayaan.</p>	

	<p>4. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.</p>	<p>MDG's, Renstra 2011-2015 SPM tahun 2015</p>	<p>4. Pembiayaan kesehatan untuk penanggulangan gizi kurang masih kurang</p> <p>1. SDM program masih belum memadai dan kompeten, 2. Pembiayaan program belum memadai. 3. Sarana dan prasarana program masih kurang. 4. Sistem rujukan belum optimal.</p>	<p>pengetahuan masyarakat</p> <p>4. Dukungan lintas Sektoral</p> <p>1. Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. 2. Gaya dan pola hidup masyarakat tentang kesehatan. 3. Pola resistensi penyakit 4. Pengaruh lingkungan yang tidak sehat. 5. Keterbatasan sarana transportasi. 6. Migrasi penduduk. 7. Tingkat pengetahuan masyarakat.</p>	<p>1. Pergantian petugas pengelola program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru dan seringnya terjadinya pergantian petugas. 2. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi virulensi agen penyakit. 4. Akses pelayanan yang terhambat karena system rujukan penyakit. 5. Kurangnya terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana program secara terus-menerus. 6. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat. 7. Migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular. 8. Rendahnya pembiayaan pelaksanaan program.</p>
	<p>5. Masih rendahnya akses sanitasi dasar Masyarakat</p>	<p>SPM Dinkes 2015</p>	<p>1. SDM kesehatan lingkungan yang belum merata. 2. Fasilitas/sarana belum memadai 3. Koordinasi lintas program masih kurang.</p>	<p>1. Kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan masih kurang. 2. Dukungan lintas sector terkait belum optimal. 3. Sarana pengelolaan limbah fasyankes belum memadai. 4. Koordinasi penanggulangan kualitas lingkungan belum memadai. 5. Pemberdayaan masyarakat masih kurang. 6. Masih rendahnya pembiayaan program.</p>	<p>1. Kompetensi, jumlah dan penempatan SDM kesling belum optimal dan belem merata. 2. Fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan lingkungan belum memadai. 3. Koordinasi lintas program belum terpadu.</p>
	<p>5. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.</p>	<p>LAKIP, LKPj tahun 2015.</p>	<p>1. Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai 2. Sarana dan prasarana belum memadai.</p>	<p>1. Anggaran kesehatan belum sesuai dengan UU (10 % dari APBD)</p>	<p>1. Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan.</p>

<p>6. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>SPM tahun 2015 Profil kesehatan tahun 2015.</p>	<p>1. Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai. 2. Sarana dan prasarana penunjang masih belum optimal. 3. Belum optimalnya penggalangan kemitraan dan advokasi dalam program PHBS. 4. Upaya kesehatan masih bersifat kuratif.</p>	<p>1. Belum adanya kebijakan publik berwawasan kesehatan. 2. Program promosi kesehatan masih belum optimal. 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat. 4. Masih rendahnya dukungan lintas sektor.</p>	<p>1. Masih rendahnya cakupan pelayanan masyarakat dan promosi kesehatan. 2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap PHBS.</p>
<p>7. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan JKN mandiri.</p>	<p>SPM tahun 2015</p>	<p>1. Masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat. 2. Masih belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana program.</p>	<p>1. Dukungan lintas sector masih belum optimal. 2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.</p>	<p>1. Masyarakat belum semua mendapatkan pelayanan melalui JKN. 2. Terganggunya pelayanan kesehatan pada masyarakat karena belum memiliki JKN. 1. Ketersediaan obat yang belum terpenuhi</p>
<p>8. Belum optimalnya pelaksanaan upaya Kesehatan Masyarakat</p>	<p>SPM tahun 2015</p>	<p>1. Masih rendahnya kualitas SDM kesehatan terhadap upaya kesehatan masyarakat (program pengembangan: Perkesmas, Lansia, Jiwa, Kes. Olahraga, Indera, dsb). 2. Kurangnya peran lintas program.</p>	<p>1. Dukungan lintas sector masih belum optimal. 2. Dukungan pembiayaan masih kurang karena terfokus pada program lain. 3. Dukungan sarana dan prasarana penunjang.</p>	<p>1. Rendahnya cakupan dan capaian program upaya kesehatan masyarakat. 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat terhadap upaya pengembangan kesehatan.</p>
<p>9. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas (UPTD)</p>	<p>SPM tahun 2015 Renstra 2011-2015</p>	<p>1. Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai. 2. Sarana dan prasarana belum memadai. 3. Pemahaman manajemen Puskesmas belum optimal. 4. Masih rendahnya komitmen lintas program.</p>	<p>1. Belum optimalnya kinerja Puskesmas, terutama manajemen perencanaan, aset dan monitoring dan evaluasi. 2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana.</p>	<p>1. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan komprehensif masih belum optimal. 2. Sistem akreditasi Puskesmas dalam memberikan pelayanan belum terpenuhi.</p>

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan capaian / kondisi pada saat ini yaitu :

1. Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat.
2. Masih tingginya kematian ibu maternal (AKI) dan jumlah kematian bayi (AKB) sehingga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
3. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan stunting.
4. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
5. Masih rendahnya kualitas dan akses sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat.
6. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) mandiri.
8. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.
9. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.
10. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan.

Maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan pokok dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan strategis tahun 2016-2021 yaitu :

1. Belum optimalnya kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kurang merata.
2. Kualitas / mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan belum sesuai standard.
3. Akses pelayanan yang terhambat karena sistem rujukan penyakit yang belum optimal dan masyarakat belum semua mendapatkan pelayanan melalui JKN dikarenakan masyarakat belum memiliki JKN.
4. Keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Sistem akreditasi puskesmas dalam pelayanan belum terpenuhi.
7. Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi virulensi agen penyakit.
8. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat dikarenakan masih rendahnya cakupan pelayanan masyarakat dan promosi kesehatan serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap PHBS.

9. Koordinasi lintas program belum terpadu.
10. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus
11. Pembiayaan/anggaran pembangunan kesehatan masih rendah.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera* .” dengan misi yaitu:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yg rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka beberapa isu-isu strategis yang berhubungan dengan program pembangunan kesehatan untuk periode 2016-2021 yaitu:

1. Secara umum masih belum optimalnya peran penyelenggara Pemerintahan dan kualitas aparatur Pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kesehatan, air bersih dan sanitasi dasar masyarakat.
3. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
4. Belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

5. Derajat kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat SDM bidang kesehatan dan memperdekat pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan masyarakat termasuk pada daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil.
6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan visi dan misi yang dihubungkan dengan permasalahan pembangunan kesehatan yaitu: “*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang optimal*”.

3.3 Telahaan Renstra Kementerian Kesehatan dan Lembaga serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari kebijakan dan isu-isu strategis pembangunan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga dan organisasi vertikal yang terkait langsung terhadap kebijakan dan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021.

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- a. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) walaupun pada tahun 2015 (MDG's) mengalami penurunan namun masih jauh dari target yang ditetapkan, khususnya disebabkan oleh penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria dan 4 T. Sedangkan pada kematian bayi dan balita lebih disebabkan oleh terjadinya *intra uterine fetal death* (IUFD) dan BBLR, sementara pada kematian pada usia sekolah dan remaja disebabkan oleh kecelakaan transportasi, penyakit DBD dan TBC.
- b. Perkembangan masalah gizi semakin komplek, dimana saat ini masih menghadapi masalah kekurangan gizi, namun masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus diatasi.

- c. Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (*underweight*) dan prevalensi balita yang pendek (*stunting*).
- d. Masih tingginya prevalensi penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, Malaria, DBD, Influenza, disamping itu Indonesia masih belum juga sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit Kusta, Filariasis, dan penyakit-penyakit akibat tidak diimunisasi yaitu Polio, Campak, Difteri, Pertussis dan Hepatitis B serta Tetanus.
- e. Meningkatkan jumlah dan kejadian (*prevalensi*) penyakit tidak menular (PTM) yaitu hipertensi, DM, kanker dan penyakit paru serta jantung, terutama penyakit yang disebabkan oleh perilaku merokok yang masih tinggi yaitu 41,75 %.
- f. Upaya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat.
- g. Permasalahan kesehatan jiwa yang sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan.
- h. Masih kurang optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil.
- i. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- j. Aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- k. Keterbatasan SDM kesehatan dan rendahnya kualitas kompetensi dan kurang optimalnya penyebaran atau distribusi tenaga kesehatan.
- l. Ketersediaan pembiayaan pembangunan kesehatan yang masih dibawah 10 %.
- m. Manajemen, regulasi dan masih kurang tersedianya data dan sistem informasi kesehatan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB).
2. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan balita pendek (*stunting*).
3. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular.
4. Masih tingginya permasalahan kesehatan akibat bencana.
5. Masih rendahnya akses sanitasi dasar masyarakat dan kesehatan lingkungannya.
6. Belum optimalnya pemenuhan SDM kesehatan.

7. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
8. Masih tingginya kasus gangguan jiwa.
9. Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat dan memadai sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
10. Belum optimalnya dukungan manajemen.
11. Masih belum optimalnya mutu Unit pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD).

3.4 Telaahan Renstra Tara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang- undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Dasar hukum rencana tata ruang wilayah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030, Dengan terbitnya Undang-undang dimaksud maka perlu penyesuaian perencanaan tata ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit dengan ketinggian berkisar 0 – 1000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 19 sungai. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 70,54 persen hutan lebat dan 13,37 persen hutan belukar, lahan sawah 6,07 persen, perkebunan 2,30 persen dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0^o59' - 2^o 28,6' Lintang Selatan dan 100^o19'- 101^o18' Bujur timur, memiliki batas wilayah Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, Sebelah Utara dengan Kota Padang, Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi dan Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia dan terbagi 15 Wilayah Kecamatan, 182 Nagari dengan luas wilayah 5.749,89 Km².

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan telaahan isu-isu strategis baik berasal dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, maka berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilaksanakan sehingga ditentukanlah isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016-2021, yaitu:

1. Masih adanya kematian ibu maternal (AKI) dan jumlah kematian bayi (AKB) sehingga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
2. Masih adanya balita gizi kurang dan stunting.
3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.

4. Masih rendahnya kualitas dan akses sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
7. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat berbasis individu, keluarga risti dan kelompok masyarakat resiko tinggi terhadap masalah kesehatan.
9. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan.
10. Belum optimalnya kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.
11. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan kurang memenuhi standard.
12. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
13. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Belum maksimalnya kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
16. Pembiayaan/anggaran pembangunan kesehatan masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Kesehatan

Adapun rumusan tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 adalah : ***“ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Optimal”***

4.2 Sasaran Dinas Kesehatan

Tujuan Dinas Kesehatan dapat dicapai dengan beberapa sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- b. Meningkatnya kesehatan keluarga
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk hidup sehat
- d. Meningkatnya kualitas dan pemerataan SDK (Sumber Daya Kesehatan)
- e. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
- f. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
- g. Meningkatnya status gizi masyarakat
- h. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit
- i. Terwujudnya pengembangan lingkungan sehat
- j. Meningkatnya pengembangan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat

TABEL IV. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	UHH	70,11	70,15	70,2	70,4	70,6	70,8
		Menurunkan Kematian pada kelompok Rentan	Angka Kematian Ibu (AKI)	100/ 100.000 KH	98/ 100.000 KH	96/ 100.000 KH	94/ 100.000 KH	92/ 100.000 KH	90/ 100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB)	25/ 1000 KH	24/ 1000 KH	23/ 1000 KH	22/ 1000 KH	21/ 1000 KH	20/ 1000 KH
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepuasan Masyarakat	50%	55%	60%	65%	70%	75%
		Meningkatnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase Nagari Ber-PHBS	60%	65%	70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kesehatan

Strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan prioritas Dinas Kesehatan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (output) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Adapun rumusan strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa menghilangkan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*).**

Strategi pembangunan kesehatan ini lebih mengoptimalkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas sebagai unit terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat melalui :

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
- b. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat (UKM).
- c. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan (UKP).
- d. Memantau dan mendorong pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan.

Adapun fokus strategi dalam melaksanakan penguatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDGs dapat lebih cepat tercapai;
- c. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, Malaria dan TBC;
- d. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada seperti puskesmas dan posyandu, Polindes/poskesri;

- e. Meningkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam, KLB dan wabah;
 - f. Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based;
 - g. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna;
 - h. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan;
 - i. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia;
- 2. Melakukan penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) dengan fokusnya:**
- a. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
 - b. Peningkatan mutu kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu nifas, usia lanjut (Lansia), usia kerja produktif.
- 3. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan dan bertanggungjawab.**

Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir

Fokus :

- a. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB.
- b. Meningkatkan pengawasan dan penyelidikan kesehatan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kesehatan yang modern dan terjamin;
- d. Meningkatkan produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur Dinas Kesehatan, dengan fokus:

- a. Menyusun standard kompetensi jabatan struktural dan fungsional SDM kesehatan.
- b. Mengembangkan sistem kaderisasi secara terbuka di internal unit kerja.
- c. Melakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan SDM kesehatan.
- d. Peningkatan kerjasama antar institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi.
- e. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
- f. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan sesuai kebutuhan program.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kelompok dan antar lembaga

Mendorong kerjasama antar masyarakat, kelompok dan antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan, memantapkan peran serta masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan, meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan yang efektif.

Fokus :

- a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- b. Meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan saran dan prasarana dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- c. Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan mencapai 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah);
- d. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB;

e. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor/mitra kerja, LSM, Organisasi Profesi, dsb.

6. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas, memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat.

Fokus :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial generik dan meningkatkan penggunaan obat rasional;
- b. Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang benar serta meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian;
- c. Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu.

7. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan

Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan konsep, kelembagaan dan dukungan terhadap penerapan jaminan sosial menuju Universal Coverage, menyusun perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran, menghimpun sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran serta masyarakat untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjajalakan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya program-program unggulan/prioritas nasional, merancang dan menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan

Fokus :

- a. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dar segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.

- b. Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdayaguna dan berhasilguna;
- c. Mendorong tercapainya pembiayaan minimal 10% dari APBD, diluar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

5.2 Analisa Pencapaian Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Analisa pencapaian tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, dengan cara :

- a. Meningkatnya perilaku hidup sehat
 - Analisis pencapaian indikator balita yang ditimbang berat badannya
 - Analisis pencapaian indikator penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
 - Analisis pencapaian indikator penduduk yang menggunakan jamban sehat
- b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - Analisis pencapaian indikator persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes)
 - Analisis pencapaian indikator kunjungan neonatal pertama (KN 1)
- c. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
- d. Menurunnya angka kesakitan dan kematian
 - Analisis pencapaian indikator menurunnya angka kematian ibu
 - Analisis pencapaian indikator menurunnya angka kematian bayi
 - Analisis pencapaian indikator penemuan kasus baru Tuberculosis
 - Analisis pencapaian indikator menurunnya kasus malaria
 - Analisis pencapaian indikator meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 bulan
- e. Meningkatnya penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
- f. Menurunnya prevalensi gizi kurang
- g. Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera		
MISI	: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan	1. Menurunkan Kematian pada kelompok rentan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Kesehatan	Melakukan pembangunan di Bidang kesehatan Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM Kesehatan
	2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Menurunkan Angka kesakitan dalam keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan peningkatan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan
	3. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kelompok dan antar lembaga	Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor/mitra kerja, LSM, Organisasi Profesi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - 2) Penunjang Operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan.
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan :
 - 1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
 - 2) Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan kesehatan
 - 3) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 - 4) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Penunjang DAK)
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
 - 2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 3) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan) (BOK)
 - 4) Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan
 - 5) Pelayanan Kesehatan pada Pengobatan Tradisional (BATRA
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
 - 1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
 - 2) Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Sera Masyarakat (PSM)
 - 3) Pembinaan dan Pembentukan Desa Siaga

- 4) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Kabuapten.
7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan :

 - 1) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
 - 2) Pemantauan Status Gizi Masyarakat
 - 3) Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat.
8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan :

 - 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
 - 2) Pembinaan dan pengawasan PAMSIMAS.
 - 3) Penunjang Program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP).
 - 4) Pengelolaan dan Pengembangan pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat.
 - 5) Pelaksanaan forum kecamatan dan kabupaten sehat
 - 6) Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 7) Pelayanan Kesehatan Olahraga
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan :

 - 1) Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk.
 - 2) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - 3) Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik/epidemik.
 - 4) Peningkatan imunisasi.
 - 5) Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah.
 - 6) Pemantauan dan penanggulangan masalah akibat bencana, KLB dan wabah.
 - 7) Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap KLB / Wabah dan Bencana
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/Pustu/Rumah Sakit dan Jaringannya

Kegiatan :

 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.
 - 2) Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Daerah Terpencil
 - 3) Pengadaan puskesmas keliling.
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas.
 - 5) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - 6) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas.

- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
 - 8) Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (Penunjang DAK)
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan :
- 1) Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan
 - 2) Pembinaan dan evaluasi monitoring dr/drg/bidan PTT.
 - 3) Upaya peningkatan kinerja petugas dan isntitusi kesehatan.
 - 4) Pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional.
 - 5) Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK Non Fisik)
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Kegiatan :
- 1) Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan.
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
- Kegiatan :
- 1) Kemitaraan asuransi kesehatan masyarakat.
 - 2) Pelayanan gratis di Puskesmas dan jaringannya.
 - 3) Pelayanan kesehatan (kapitasi) jaminan kesehatan nasional (JKN) di Puskesmas.
 - 4) Pelayanan kesehatan (non kapitasi) jaminan kesehatan nasional (JKN) di Puskesmas.
14. Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Kegiatan :
- 1) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - 2) Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan usia sekolah (Prasekdam Usek)
 - 3) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) (DAK Non Fisik)
15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Kegiatan :
- 1) Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular.
 - 2) Pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan Matra.
 - 3) Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 4) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

6.2 Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan skala prioritas Program Pembangunan Kesehatan dengan mengacu pada RPJMD Daerah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 melalui dana APBD Kabupaten sebesar Rp. **570.929.860.280,-** (**Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah**) dengan perincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Dana (Rp.)
1.	2016	68.152.138.080,-
2.	2017	82.107.875.000,-
3.	2018	103.735.649.600,-
4.	2019	100.532.695.300,-
5.	2020	105.428.524.200,-
6.	2021	110.972.978.100,-
	Total	570.929.860.280,-

Program-program pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG DAN URUSAN

7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Adapun indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Kematian Ibu
3. Angka Kematian Bayi
4. Prevalensi Balita Gizi kurang
5. Persentase Posyandu Mandiri
6. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
7. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
8. Rasio dokter persatuan penduduk
9. Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk
10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
11. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
12. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
13. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit DBD
16. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
17. Cakupan kunjungan bayi
18. Cakupan Puskesmas (Persen)
19. Cakupan Puskesmas Pembantu

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama RPJMD yang Berhubungan dengan Kinerja Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	70.11	70.11	70,15	70,2	70,4	70,6	70,8	70,8

7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan merupakan Indikator yang strategis untuk mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target						Sumber Data Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Menurunkan Kematian pada kelompok Rentan	Angka Kematian Ibu (AKI)	$(\text{Jumlah Kematian Ibu} / \text{Jumlah Kelahiran Hidup}) \times 100.000 \text{ KH}$	100/100.000 KH	98 / 100.000 KH	96/ 100.000 KH	94/ 100.000 KH	92/ 100.000 KH	90/ 100.000 KH	Kabid Kesmas
		Angka Kematian Bayi (AKB)	$(\text{Jumlah kematian} / \text{Jumlah kelahiran hidup}) \times 1000$	25/ 1000 KH	24/ 1000 KH	23/ 1000 KH	22/ 1000 KH	21/ 1000 KH	20/ 1000 KH	Kabid Kesmas
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepuasan Masyarakat	$(\text{Jlh masy. yang puas thd pelayanan di Puskesmas} / \text{Jumlah kunjungan}) \times 100\%$	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Kabid Yankes
3	Meningkatnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase Nagari Ber-PHBS	$(\text{Jumlah Nagari ber-PHBS} / \text{Jumlah Seluruh Nagari}) \times 100\%$	65%	70%	75%	80%	85%	90%	kabid Kesmas
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	B	BB	A	A	A	A	Sekretariat

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4.6/ 1000 KH	25/ 1000 KH	24/ 1000 KH	23/ 1000 KH	22/ 1000 KH	21/ 1000 KH	20/ 1000 KH	20/ 1000 KH
2	Angka kelangsungan hidup bayi	0							0
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	35	35	34	33	32	31	30	30
4	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	25	25	24	23	22	21	20	20
5	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	55/ 100.000 KH	100/ 100.000 KH	98/ 100.000 KH	96/ 100.000 KH	94/ 100.000 KH	92/ 100.000 KH	90/ 100.000 KH	90/ 100.000 KH
6	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 68	1 : 68	1 : 68	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50
7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088
9	Rasio Dokter per satuan penduduk	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	74.39	80	80	80	90	90	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	93.19	90	90	90	93	95	98	98
13	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI)	86.01	86	8	90	92	94	95	95
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum(standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari)	0							0
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	80	80	85	90	95	100	100	100

17	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	833	833	843	923	1058	1058	1058	1058
20	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	0.149	0.149	0.16	0.18	0.18	0.18	0.2	0.2
21	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	16	16	18	18	18	18	18	18
22	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	833	833	843	923	1058	1058	1058	1058
23	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	0.94	94%	96%	97%	96%	96%	96%	0.96
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
25	Penderita diare yang ditangani	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
26	Angka kejadian malaria	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Pendud	< 1/1000 Pendud	< 1/1000 Pendudu	< 1/1000 Pendudu	< 1/1000 Pendud	< 1/1000 Penduduk
27	Tingkat Kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	65	65	60	50	40	30	20	20

34	Cakupan kunjungan bayi	84	84	85	86	87	88	89	89
35	Cakupan Puskesmas	2.34	2.34	2.38	2.4	2.45	2.5	2.5	2.5
36	Cakupan Pembantu Puskesmas	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
37	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	76	76	79	82	85	87	90	90
38	Cakupan pelayanan nifas	78	78	80	83	86	88	91	91
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75	75	80	85	90	95	100	100
40	Cakupan pelayanan anak balita	78	78	80	81	82	83	84	84
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	20	20	21	22	23	24	25	25
42	cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	60	60	65	70	100	100	100	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	78.7	78.7	80	82.5	85	87.5	90	90
45	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	90	90	90	95	95	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 juga merupakan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan Masyarakat Pesisir Selatan . Disamping itu Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkronisasi antara satu dengan lainnya didalam satu Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: ***“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan”***.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program dan Kegiatan tahun 2016-2021 serta tersusunya Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang merupakan pelaksanaan aplikatif dari Renstra tersebut yang bertujuan untuk perencanaan anggaran pembangunan kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang tugas pokok dan fungsi serta sasaran prioritas program pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Tercapainya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administratif perkantoran		12 bulan	2.476.203.850	12 bulan	2.538.108.740	12 bulan	2.601.561.460	12 bulan	2.666.600.500	12 bulan	2.733.265.510	0 bulan	13.015.739.880	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi		12 bulan	267.144.000	12 bulan	320.572.800	12 bulan	384.687.360	12 bulan	461.624.832	12 bulan	553.949.798	0 bulan	1.987.978.790	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	terpeliharanya BMD		0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	242.163.302	0 bulan	242.163.302	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional		12 bulan	588.444.000	12 bulan	706.132.800	12 bulan	847.359.360	12 bulan	1.016.831.232	0 bulan	-	0 bulan	3.158.767.392	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan		12 bulan	208.800.000	12 bulan	250.560.000	12 bulan	300.672.000	12 bulan	360.806.400	12 bulan	432.967.680	0 bulan	1.553.806.080	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	ketersediaan jasa kebersihan kantor dan pramu kantor		12 bulan	245.700.000	12 bulan	294.840.000	12 bulan	353.808.000	12 bulan	424.569.600	12 bulan	509.483.520	0 bulan	1.828.401.120	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja		12 bulan	16.690.000	12 bulan	20.016.000	12 bulan	24.019.200	12 bulan	28.823.040	12 bulan	34.587.648	0 bulan	124.125.888	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis kantor		12 bulan	133.722.000	12 bulan	160.466.400	12 bulan	192.559.680	12 bulan	231.071.616	12 bulan	277.285.939	0 bulan	995.105.635	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	76.200.000	12 bulan	91.440.000	12 bulan	109.728.000	12 bulan	131.673.600	12 bulan	158.008.320	0 bulan	567.049.920	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		12 bulan	129.264.000	12 bulan	155.116.800	12 bulan	186.140.160	12 bulan	223.368.192	12 bulan	268.041.830	0 bulan	961.930.982	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		100% unit	84.198.000	100% unit	101.037.600	100% unit	121.245.120	100% unit	145.494.144	100% unit	174.592.973	0 unit	626.567.837	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	16.608.000	12 bulan	19.929.600	12 bulan	23.915.200	12 bulan	28.698.642	12 bulan	34.438.349	0 bulan	123.590.111	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	ketersediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu		12 bulan	247.368.000	12 bulan	296.841.600	12 bulan	356.209.902	12 bulan	427.451.904	12 bulan	512.942.265	0 bulan	1.840.813.691	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	ketersediaan operasional untuk rapat - rapat: koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	135.000.000	12 bulan	162.000.000	12 bulan	194.400.000	12 bulan	233.280.000	12 bulan	279.936.000	0 bulan	1.004.616.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	ketersediaan operasional untuk rapat - rapat: koordinasi dan konsultasi didalam daerah		12 bulan	165.780.000	12 bulan	198.936.000	12 bulan	238.723.200	12 bulan	286.467.840	12 bulan	343.761.408	0 bulan	1.233.668.448	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	ketersediaan jasa pengamanan kantor		12 bulan	10.800.000	12 bulan	12.960.000	12 bulan	15.552.000	12 bulan	18.662.400	12 bulan	22.394.880	0 bulan	80.369.280	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.30	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia		10 dokumen	152.328.000	10 dokumen	182.793.600	10 dokumen	219.352.320	10 dokumen	263.222.784	10 dokumen	315.867.341	0 dokumen	1.133.564.045	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.33	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Puskemas	ketersediaan operasional administrasi perkantoran puskesmas		- bulan	-	- bulan	-	- bulan	-	12 bulan	1.720.467.000	12 bulan	1.800.000.000	0 bulan	3.520.467.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.35	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	tersedianya penyusunan rencana strategis SKPD		0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.38	Peminaan dan Pengelolaan Aset	tersedianya pembinaan dan pelatihan bintek aset dan pengelolaan aset		100% -	116.784.000	100% -	140.140.800	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	256.924.800	Dinas Kesehatan		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Tercapainya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja		12 bulan	95.000.000	12 bulan	97.375.000	12 bulan	99.809.380	12 bulan	102.304.610	12 bulan	104.862.220	0 bulan	499.351.210	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli		0 unit	-	0 unit	-	3 unit unit	300.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	300.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	350.000.000	0 paket	350.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor di beli		- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	31 unit	100.000.000	0 unit	100.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.10	Pengadaan Mebeuler	Jumlah mebeuler yang di beli		- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	40 unit	50.000.000	0 unit	50.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor		12 bulan	55.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	95.000.000	0 bulan	405.000.000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional		0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	12 unit	1.220.197.478	0 unit	1.220.197.478	Dinas Kesehatan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya		- orang	50.000.000	- orang	51.250.000	- orang	52.531.250	- orang	53.844.530	- orang	55.190.640	0,00 orang	262.816.420	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mendapat / mengikuti pendidikan		3 orang	60.000.000	3 orang	70.000.000	3 orang	75.000.000	3 orang	80.000.000	3 orang	85.000.000	0 orang	370.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.09	Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan	jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan		30 orang	65.000.000	30 orang	70.000.000	30 orang	85.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	225.000.000	0 orang	545.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.15	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	Terpenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar		80 %	4.095.000.000	82 %	4.197.375.000	85 %	4.302.309.000	90 %	4.409.867.000	95 %	4.520.113.001	510,00 %	21.524.664.001	Dinas Kesehatan	
		1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah paket obat yang diadakan		2 paket	5.200.000.000	2 paket	5.400.000.000	2 paket	5.600.000.000	2 paket	5.800.000.000	2 paket	6.000.000.000	0 paket	28.000.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.15.02	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan		18 puskesmas	350.000.000	20 puskesmas	370.000.000	20 puskesmas	380.000.000	20 puskesmas	390.000.000	20 puskesmas	400.000.000	0 puskesmas	1.890.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.15.08	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	Persentase Kelancaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		80% persen	75.000.000	82% persen	80.000.000	85% persen	85.000.000	90% persen	90.000.000	95% persen	95.000.000	0 persen	425.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.15.09	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	jumlah irtp, toko obat dan apotik yang dilakukan pengawasan		30,5,5 irtp,toko obat dan apotik	75.000.000	30,5,5 irtp,toko obat dan apotik	150.000.000	70 irtp,toko obat dan apotik	200.000.000	75 irtp,toko obat dan apotik	250.000.000	80 irtp,toko obat dan apotik	300.000.000	0 irtp,toko obat dan apotik	975.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.15.10	Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan (DAK Penugasan)	jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan		0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	4 paket	2.153.532.008	4 paket	2.500.000.000	0 paket	4.653.532.008	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Visite Rate		2,38 -	3.963.009.001	2,42 -	4.062.084.001	2,46 -	4.162.637.000	2,48 -	4.267.727.001	2,5 -	4.374.421.000	0,00 -	20.830.878.003	Dinas Kesehatan	
		1.02.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	jumlah wilayah daerah terpicil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		6 wilayah	205.000.000	6 wilayah	247.500.000	6 wilayah	275.000.000	6 wilayah	290.000.000	6 wilayah	325.000.000	0 wilayah	1.342.500.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah event - event daerah dan puskesmas		5 event, 20 puskesmas event dan puskesmas	735.000.000	5 event, 20 puskesmas event dan puskesmas	747.570.000	5 event, 20 puskesmas event dan puskesmas	789.815.000	5 event, 20 puskesmas event dan puskesmas	850.000.000	5 event, 20 puskesmas event dan puskesmas	1.000.000.000	0 event dan puskesmas	4.102.385.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.16.15	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan, BOK, DAK Non Fisik)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat		82,5% persen	3.250.000.000	85% persen	3.500.000.000	88% persen	3.750.000.000	90% persen	4.000.000.000	95% persen	4.250.000.000	0 persen	18.750.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.16.16	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat dan menurutnya kasus rujukan yang ditangani puskesmas		83 persen	60.000.000	85 persen	75.000.000	87 persen	85.000.000	90 persen	100.000.000	95 persen	110.000.000	0 persen	430.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.16.17	Pelayanan kesehatan pada pengobatan tradisional (Batra)	persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat kelompok batra		75 persen	40.000.000	80 persen	41.250.000	82,50 persen	45.000.000	85 persen	50.000.000	87 persen	55.000.000	0 persen	231.250.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase makanan dan obat-obatan beredar sesuai standar kesehatan		0 %	-	0 %	-	75 %	200.000.000	80 %	250.000.000	85 %	300.000.000	240,00 %	750.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah PIRT, Toko Obat dan apotik yang diawasi dan dibina		0 PIRT, Toko Obat dan Apotik	-	30 PIRT, 5 Toko Obat dan 5 Apotik PIRT, Toko Obat dan Apotik	150.000.000	30 PIRT, 5 Toko Obat dan 5 Apotik PIRT, Toko Obat dan Apotik	200.000.000	30 PIRT, 5 Toko Obat dan 5 Apotik PIRT, Toko Obat dan Apotik	250.000.000	30 PIRT, 5 Toko Obat dan 5 Apotik PIRT, Toko Obat dan Apotik	300.000.000	0 PIRT, Toko Obat dan Apotik	900.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.17.07	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Dak Non Fisik	jumlah irtp, toko obat dan apotik yang dilakukan pengawasan		- irtp,toko obat dan apotik	-	- irtp,toko obat dan apotik	-	- irtp,toko obat dan apotik	-	30,5,5 irtp,toko obat dan apotik	215.167.000	30,5,5 irtp,toko obat dan apotik	300.000.000	0 irtp,toko obat dan apotik	515.167.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Nagari Siaga Aktif		45 %	694.593.000	50 %	711.958.000	55 %	729.756.001	60 %	748.000.001	65 %	766.700.001	315,00 %	3.651.007.003	Dinas Kesehatan	
				Persentase Rumah Tangga ber PHBS		70 %	-	75 %	-	80 %	-	85 %	-	90 %	-	435,00 %	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jenis Media Promosi dan Jumlah Puskesmas Yang dibina	4 jenis media dan 20 Puskesmas jenis media dan Puskesmas	215.000.000	4 jenis media dan 20 Puskesmas jenis media dan Puskesmas	240.000.000	4 jenis media dan 20 Puskesmas jenis media dan Puskesmas	500.000.000	4 jenis media dan 20 Puskesmas jenis media dan Puskesmas	550.000.000	4 jenis media dan 20 Puskesmas jenis media dan Puskesmas	600.000.000	0 jenis media dan Puskesmas	2.105.000.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.19.06	Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM)	Persentase Nagari Siaga Mandiri	- persen	- persen	- persen	- persen	- persen	- persen	60% persen	300.000.000	65% persen	400.000.000	0 persen	700.000.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.19.07	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	persentase poskesri nagari dan desa siaga	80 persen	110.000.000	80 persen	250.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	525.000.000	100 persen	550.000.000	0 persen	1.935.000.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.19.08	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	persentase ketersediaan sistem informasi kesehatan	100 persen	75.000.000	100 persen	110.000.000	125 persen	125.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	310.000.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.19.09	Upaya Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat	persentase kader dan petugas puskesmas yang dilatih untuk posyandu dan UKBM	65 persen	200.000.000	65 persen	500.000.000	80 persen	750.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	1.450.000.000	Dinas Kesehatan		
				persentase kader dan petugas puskesmas yang dilatih untuk posyandu dan UKBM	65 persen	200.000.000	65 persen	500.000.000	80 persen	750.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	1.450.000.000	Dinas Kesehatan		
				persentase kader dan petugas puskesmas yang dilatih untuk posyandu dan UKBM	65 persen	200.000.000	65 persen	500.000.000	80 persen	750.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	1.450.000.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.19.10	Kegiatan Implementasi Gerakan Masyarakat	jumlah puskesmas yang membina GERMAS	- puskesmas	-	- puskesmas	-	- puskesmas	-	- puskesmas	150.089.923	0 puskesmas	-	0 puskesmas	150.089.923	Dinas Kesehatan		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya prevalensi balita gizi kurang	4,75 -	344.924.001	4,65 -	353.548.000	4,60 -	362.386.001	4,55 -	371.446.000	4,50 -	380.732.001	0,00 -	1.813.038.003	Dinas Kesehatan		
				Menurunnya persentase balita gizi buruk	7,8 %	-	7,5 %	-	6,6 %	-	6,6 %	-	6,6 %	-	0,00 %	-			
		1.02.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	persentase pmt bayi bagi kurang gizi dan bumil kek	100 persen	120.500.000	100 persen	125.000.000	100 persen	127.300.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	372.800.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.20.07	Peningkatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	- persen	-	- persen	-	- persen	-	100 persen	300.000.000	100 persen	334.417.820	0 persen	634.417.820	Dinas Kesehatan		
		1.02.20.09	Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat	Jumlah puskesmas yang memantau gizi di masyarakat	18 puskesmas	118.650.000	20 puskesmas	118.650.000	20 puskesmas	121.500.000	0 puskesmas	-	0 puskesmas	-	0 puskesmas	358.800.000	Dinas Kesehatan		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari ODF (Open Defecation Free)	21,5 -	923.794.001	43,01 -	946.889.001	69,89 -	776.330.000	75,27 -	874.093.000	97,85 -	894.823.000	0,00 -	4.415.729.002	Dinas Kesehatan		
				Presentasi Nagari yang menrapkan lingkungan sehat	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	0,00 %	-			
		1.02.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Dokumen Kajian Lingkungan Sehat	5 dokumen	270.000.000	5 dokumen	317.090.800	5 dokumen	364.654.200	5 dokumen	419.352.400	5 dokumen	482.255.300	0 dokumen	1.853.352.500	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.07	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Tenaga Kesling Puskesmas Yang dibina dan dilatih	20 orang	65.000.000	20 orang	65.861.100	20 orang	75.740.300	20 orang	87.101.400	20 orang	100.166.700	0 orang	393.869.500	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.08	Pengelolaan dan Pengembangan Pemukiman Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah Depot diperiksa dan dibina	20 depot	135.000.000	20 depot	194.584.800	20 depot	223.772.600	20 depot	257.338.500	20 depot	295.939.300	0 depot	1.106.635.200	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.09	Palaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	Jumlah forum kecamatan dan forum kabupaten yang dibina	forum kecamatan dan forum kabupaten forum kecamatan dan forum kabupaten	106.737.300	forum kecamatan dan forum kabupaten forum kecamatan dan forum kabupaten	122.747.900	forum kecamatan dan forum kabupaten forum kecamatan dan forum kabupaten	141.160.100	forum kecamatan dan forum kabupaten forum kecamatan dan forum kabupaten	162.334.200	forum kecamatan dan forum kabupaten forum kecamatan dan forum kabupaten	186.684.400	0 forum kecamatan dan forum kabupaten	719.863.900	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.11	Pendamping Pansimas	persense desa stop BABS	85 persen	50.000.000	85 persen	82.098.400	85 persen	94.413.200	85 persen	108.575.200	85 persen	124.861.200	0 persen	459.948.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.12	Pelayanan Kesehatan Kerja	jumlah pos UKK yang dibina	10 jumlah	15.000.000	18 jumlah	192.245.000	0 jumlah	-	0 jumlah	-	0 jumlah	-	0 jumlah	207.245.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.13	Pelayanan Kesehatan Olahraga	persentase kesehatan olahraga di kabupaten pesisir selatan	55 persen	-	30 persen	171.191.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	171.191.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.21.14	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah pos UKK yang dibina dan persentase kesehatan olahraga	10 dan 55 jumlah dan persen	15.000.000	18 dan 55 jumlah dan persen	171.191.000	36 dan 66 jumlah dan persen	476.782.000	0 jumlah dan persen	-	0 jumlah dan persen	-	0 jumlah dan persen	862.973.000	Dinas Kesehatan		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Succes Rate TB	90 %	893.746.001	92 %	916.090.000	93 %	938.992.001	94 %	962.467.000	95 %	986.529.000	554,00 %	4.697.824.002	Dinas Kesehatan		
				Succes Rate DBD	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	0 %	-			
				Succes Rate Malaria	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	0 %	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		1.02.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	persentase fokus fogging yang dilakukan		95 persen	300.000.000	95 persen	300.000.000	95 persen	325.000.000	97 persen	350.000.000	98 persen	375.000.000	0 persen	1.650.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik/Epidemik	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Menular, Endemik/Epidemik		0 persen	-	0 persen	-	0 persen	-	80 persen	400.000.000	80 persen	480.000.000	0 persen	880.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	persentase surveilans akti dan pengawasan filiasi		90 persen	375.000.000	96 persen	385.000.000	96 persen	390.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	1.150.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.08	Peningkatan Imunisasi	persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap		80 persen	385.000.000	85 persen	425.980.000	85 persen	450.000.000	85 persen	475.000.000	85 persen	500.000.000	0 persen	2.215.980.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	jumlah puskesmas yang melaksanakan Surveillance Epidemiologi, Penantauan dan Penanggulangan Wabah		18 jumlah	65.000.000	20 jumlah	80.000.000	20 jumlah	95.000.000	20 jumlah	400.000.000	20 jumlah	475.000.000	0 jumlah	1.115.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.12	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Penanggulangan Covid-19)	jumlah Kecamatan yang terdampak krisis bencana covid Covid-19		- paket	-	- paket	-	- paket	-	15 paket	1.344.850.000	15 paket	2.000.000.000	0 paket	3.344.850.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Covid-19	Jumlah Paket pengadaan alat dan bahan kesehatan untuk penanggulangan Resiko Krisis Kesehatan akibat Covid-19		- paket	-	- paket	-	- paket	-	2 paket	5.754.474.000	2 paket	3.000.000.000	0 paket	8.754.474.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.14	Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap KLB / Wabah dan Bencana	persentase manajemen pengelolaan sistem kewaspadaan dini di puskesmas		75 persen	70.000.000	80 persen	75.000.000	90 persen	95.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	240.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.22.15	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana / KLB	persentase terpantau jumlah kasus KLB		82 persen	85.000.000	85 persen	110.000.000	87 persen	130.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	325.000.000	Dinas Kesehatan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi		55 %	2.069.948.000	85 %	2.121.697.000	100 %	596.171.000	100 %	673.916.000	100 %	749.790.001	460,00 %	6.211.522.001	Dinas Kesehatan			
		1.02.23.07	Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (DAK Non Fisik)	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama dan paripurna		9 puskesmas	1.203.691.200	17 puskesmas	1.200.000.000	20 puskesmas	1.050.000.000	20 puskesmas	1.050.000.000	5 utama dan 1 paripurna puskesmas	1.000.000.000	0 puskesmas	5.503.691.200	Dinas Kesehatan			
		1.02.23.08	Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (Pendamping)	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama dan paripurna		9 puskesmas	700.000.000	15 puskesmas	715.000.000	17 puskesmas	725.000.000	20 puskesmas	735.000.000	5 utama dan 1 paripurna puskesmas	750.000.000	0 puskesmas	3.625.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.23.09	Pengelolaan dan Pembinaan Pegawai	jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang dibina		0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	800 orang	-	60.000.000	800 orang	65.000.000	0 orang	125.000.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.23.10	Upaya Peningkatan Kinerja dan Institusi Kesehatan	Jumlah rekomendasi Izin Operasional Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan		30 surat rekomendasi	100.000.000	40 surat rekomendasi	120.000.000	50 surat rekomendasi	144.000.000	60 surat rekomendasi	150.000.000	70 surat rekomendasi	150.000.000	0 surat rekomendasi	684.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.23.11	Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dir/dig/bidan PTT	persentase kualitas kinerja dir/dig/bidan pit		95 persen	65.000.000	95 persen	80.000.000	100 persen	85.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	230.000.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.23.12	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional	persentase kinerja tenaga fungsional		95 persen	85.000.000	95 persen	100.000.000	95 persen	10.500.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	195.500.000	Dinas Kesehatan			
		1.02.23.13	Akreditasi Rumah Sakit	jumlah akreditasi dasar		0 -	-	0 -	-	1 -	1.000.000.000	1 -	1.000.000.000	1 -	1.000.000.000	1 -	1.000.000.000	0 -	3.000.000.000	Dinas Kesehatan	
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan Puskesmas		2,38 -	10.375.610.000	2,40 -	10.635.000.000	2,45 -	10.900.875.000	2,50 -	11.173.397.000	2,50 -	11.452.732.000	0,00 -	54.537.614.001	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas/Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar		30 %	-	50 %	-	70 %	-	90 %	-	100 %	-	355,00 %	-				
1.02.25.04	Pengadaan puskesmas keliling			jumlah puskesmas keliling yang diadakan		3 unit -	1.200.000.000	1 unit -	400.000.000	1 unit -	400.000.000	1 unit -	400.000.000	1 unit -	400.000.000	1 unit -	400.000.000	0 -	2.800.000.000	Dinas Kesehatan	
1.02.25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas			jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki bangunan sesuai standar		13 paket pekerjaan	5.000.000.000	13 paket pekerjaan	6.000.000.000	14 paket pekerjaan	6.500.000.000	15 paket pekerjaan	7.000.000.000	16 paket pekerjaan	7.500.000.000	0 paket pekerjaan	32.000.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)			jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki bangunan sesuai standar		13 paket pekerjaan	1.500.000.000	13 paket pekerjaan	2.500.000.000	14 paket pekerjaan	3.000.000.000	15 paket pekerjaan	3.500.000.000	16 paket pekerjaan	4.000.000.000	0 paket pekerjaan	14.500.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya			jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki bangunan sesuai standar		13 paket pekerjaan	1.400.000.000	13 paket pekerjaan	1.500.000.000	14 paket pekerjaan	1.750.000.000	15 paket pekerjaan	2.000.000.000	16 paket pekerjaan	2.500.000.000	0 paket pekerjaan	9.150.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.26	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)			jumlah alat - alat kesehatan		5 paket pekerjaan	500.000.000	4 paket pekerjaan	800.000.000	5 paket pekerjaan	2.000.000.000	5 paket pekerjaan	2.000.000.000	5 paket pekerjaan	2.000.000.000	0 paket pekerjaan	7.300.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.27	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DBH Pajak Rokok)			jumlah pengadaan alat kesehatan		0 paket pekerjaan	-	0 paket pekerjaan	-	0 paket pekerjaan	-	1 paket pekerjaan	150.000.000	2 paket pekerjaan	300.000.000	0 paket pekerjaan	450.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Puskesmas			jumlah alat-alat kesehatan yang di kalibrasi		0 paket pekerjaan	-	20 paket pekerjaan	300.000.000	30 paket pekerjaan	300.000.000	30 paket pekerjaan	250.000.000	30 paket pekerjaan	250.000.000	0 paket pekerjaan	1.100.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.29	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK)			terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat		2 unit -	1.200.000.000	9 unit -	5.400.000.000	9 unit -	5.400.000.000	1 unit -	600.000.000	1 unit -	600.000.000	0 -	13.200.000.000	Dinas Kesehatan			
1.02.25.30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki bangunan sesuai standar		1 paket pekerjaan	675.000.000	1 paket pekerjaan	685.000.000	1 paket pekerjaan	700.000.000	1 paket pekerjaan	715.000.000	1 paket pekerjaan	725.000.000	0 paket pekerjaan	3.500.000.000	Dinas Kesehatan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.25.31	Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Daerah Terpenting	jumlah mobil operasional yang diadakan		1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	0 unit	2.000.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.25.32	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (DAK Reguler)	jumlah paket sistem informasi kesehatan		0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	4 paket	506.000.000	4 paket	506.000.000	0 paket	1.012.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.25.33	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Pemugasan)	jumlah paket alat kesehatan		- paket	-	- paket	-	- paket	-	2 paket	1.550.000.000	2 paket	2.000.000.000	0 paket	3.550.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.25.34	Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)	jumlah alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan		0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	2 paket	220.000.000	2 paket	220.000.000	0 paket	440.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit peru-parurumah sakit mata	Persentase pemenuhan cakupan layanan rumah sakit		100 %	78.062.190.001	100%	80.013.745.000	100 %	17.933.000.000	100 %	18.381.325.000	100 %	18.840.858.000	0 %	213.231.118.001	Dinas Kesehatan	
		1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Tersedianya Tanah Pembangunan Rumah Sakit		- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	1 unit	4.000.000.000	0 unit	4.000.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.26.28	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah paket sarana dan prasarana rumah sakit		0 paket pekerjaan	-	0 paket pekerjaan	-	1 paket pekerjaan	50.000.000.000	1 paket pekerjaan	50.000.000.000	1 paket pekerjaan	40.000.000.000	0 paket pekerjaan	150.000.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.26.29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Jumlah paket alat kesehatan		- paket pekerjaan	-	- paket pekerjaan	-	1 paket pekerjaan	50.000.000.000	1 paket pekerjaan	40.000.000.000	1 paket pekerjaan	30.000.000.000	0 paket pekerjaan	120.000.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki JKN		80 %	33.708.357.001	85 %	34.551.066.001	90 %	35.414.843.000	95 %	36.300.214.001	100 %	37.207.719.001	520.00 %	177.182.199.003	Dinas Kesehatan	
		1.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat		28000 peserta	5.750.000.000	28000 peserta	6.525.000.000	28000 peserta	7.000.000.000	28000 peserta	7.200.000.000	28000 peserta	7.500.000.000	0 peserta	33.975.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.28.09	Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	terciptanya Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat		80% -	600.000.000	83% -	625.000.000	85% -	675.000.000	87,5% -	750.000.000	90% -	800.000.000	0 -	3.450.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.28.10	Pelayanan Kesehatan (Kapasitas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persentase terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat		85% persen	20.000.000.000	90% persen	21.000.000.000	95% persen	22.000.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	63.000.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.28.11	Pelayanan Kesehatan (Non-Kapasitas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persentase terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat		83% persen	2.240.000.000	85% persen	2.260.000.000	87% persen	2.280.000.000	0 persen	-	0 persen	-	0 persen	6.780.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.28.13	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (CHT)	Jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat		0 peserta	-	0 peserta	-	50 peserta	250.000.000	50 peserta	250.000.000	50 peserta	250.000.000	0 peserta	750.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan		65 %	50.267.001	70 %	51.524.001	75 %	52.812.001	80 %	54.132.001	85 %	55.486.000	435.00 %	284.221.003	Dinas Kesehatan	
		1.02.30.01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	persentase pelayanan lansia yang mendapat pelayanan		85 persen	70.000.000	85 persen	75.000.000	87 persen	80.000.000	90 persen	115.000.000	95 persen	135.000.000	0 persen	475.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian Ibu Maternal		96 Per 100.000 Kelahiran Hidup	2.868.021.000	96 Per 100.000 Kelahiran Hidup	2.939.721.001	94 Per 100.000 Kelahiran Hidup	782.053.000	92 Per 100.000 Kelahiran Hidup	884.039.000	90 Per 100.000 Kelahiran Hidup	983.570.000	570.00 Per 100.000 Kelahiran Hidup	8.457.404.002	Dinas Kesehatan	
				Menurunnya angka kematian balita		34 Per 1000 Kelahiran hidup	-	33 Per 1000 Kelahiran hidup	-	32 Per 1000 Kelahiran hidup	-	31 Per 1000 Kelahiran hidup	-	30 Per 1000 Kelahiran hidup	-	195.00 Per 1000 Kelahiran hidup	-	-	
				Menurunnya angka kematian Bayi		24 Per 1000 Kelahiran Hidup	-	23 Per 1000 Kelahiran Hidup	-	22 Per 1000 Kelahiran Hidup	-	21 Per 1000 Kelahiran Hidup	-	20 Per 1000 Kelahiran Hidup	-	135.00 Per 1000 Kelahiran Hidup	-	-	
		1.02.32.04	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	persentase k1 dan k4		85% persen	450.000.000	85% persen	625.700.000	85% persen	650.900.500	90% persen	700.815.200	90% persen	745.500.000	0 persen	3.172.915.700	Dinas Kesehatan	
		1.02.32.05	Pelayanan Kesehatan Anak Pra-Sekolah dan Usia Sekolah (Prasek dan Usek)	persentase prasek dan usek yang diberikan pelayanan kesehatan		80% -	80.000.000	82,5% -	80.000.000	85% -	90.000.000	90% -	95.000.000	95% -	100.000.000	0 -	445.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.32.06	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik	persentase persalinan di fasyankes		80% persen	2.500.000.000	85% persen	3.000.000.000	85% persen	3.250.000.000	90% persen	3.500.000.000	90% persen	3.750.000.000	0 persen	16.000.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.33	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase Nagari dengan Posbindu PTM		30 %	402.984.000	40 %	413.059.000	50 %	423.385.000	60 %	433.970.000	70 %	444.819.000	270.00 %	2.118.217.001	Dinas Kesehatan	
				Persentase deteksi dini Kanker serviks		4 %	-	6 %	-	8 %	-	10 %	-	12 %	-	42.00 %	-	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa		85 %	-	90 %	-	92 %	-	95 %	-	100 %	-	542.00 %	-		
		1.02.33.01	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan diabetes		20 persen	150.000.000	30 persen	175.000.000	40 persen	200.000.000	50 persen	250.000.000	60 persen	275.000.000	0 persen	1.050.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.33.02	Pelayanan Kesehatan Orang d(ODGJ) Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah pasien ODGJ dan Pasung yang mendapat pelayanan		5 pasien	-	5 pasien	105.000.000	5 pasien	110.000.000	5 pasien	120.000.000	5 pasien	130.000.000	0 pasien	465.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.33.03	Pemantauan dan Pengulangan Masalah Kesehatan Matra	jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan matra		18 puskesmas	75.000.000	20 puskesmas	95.000.000	20 puskesmas	115.000.000	20 puskesmas	150.000.000	20 puskesmas	155.000.000	0 puskesmas	590.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.33.04	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok	persentase deteksi dan pengendalian PTM		20 persen	230.000.000	30 persen	230.000.000	40 persen	250.000.000	50 persen	275.000.000	60 persen	300.000.000	0 persen	1.285.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.34	Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat		80 %	6.712.396.001	82,50 %	6.880.206.000	85 %	7.052.211.001	87,50 %	7.228.516.001	90 %	7.409.229.001	255.00 %	35.282.558.003	Dinas Kesehatan	
		1.02.34.01	Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	persentase pelayanan RSUD Tapan		100 persen	15.000.000.000	100 persen	7.000.000.000	100 persen	7.000.000.000	100 persen	5.500.000.000	100 persen	12.000.000.000	0 persen	46.500.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.35	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase kemampuan Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan operasional		100 %	59.863.400.001	100 %	61.359.985.001	100 %	62.893.985.000	100 %	64.466.334.001	100 %	66.077.993.000	0 %	314.661.697.003	Dinas Kesehatan	
		1.02.35.01	Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD Puskesmas		- persen	-	- persen	-	- persen	-	90 persen	25.000.000.000	90 persen	30.000.000.000	0 persen	55.000.000.000	Dinas Kesehatan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	5.02.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu		ada -	4.510.374.400	ada -	4.623.133.760	ada -	1.578.249.740	ada -	1.578.249.740	ada -	1.578.249.740	0.00 -	13.868.257.380	Dinas Kesehatan	
				KUA dan PPAS APBD/P-APBD tepat waktu		ada -	-	ada -	-	ada -	-	ada -	-	ada -	-	0.00 -	-		
				Persentase perangkat daerah yang terbit Penatausahaan Barang Milik Daerah		75 -	-	75 -	-	75 -	-	75 -	-	75 -	-	450.00 -	-		
				Persentase aset Setda yang dikelola dengan baik		80 %	-	85 %	-	85 %	-	90 %	-	100 %	-	520.00 %	-		
				Realisasi PAD		127.705.089.677 Rp	-	140.475.598.645 Rp	-	154.523.158.509 Rp	-	169.975.474.360 Rp	-	186.973.021.796 Rp	-	0.00 Rp	-		
				Persentase Peningkatan PAD		- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	0.00 %	-		
		5.02.15.16	Peningkatan Manajemen Ase/Barang Daerah	terpeliharanya BMD		- bulan	-	12 bulan	150.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	250.000.000	0 bulan	-	0 bulan	600.000.000	Dinas Kesehatan	

